



Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Pendidikan Inklusif Di SMP Negeri 2 Kota Pontianak

Fitriani S

Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat, Indonesia
Email: f217124023@student.untan.ac.id

Muhammad Asrori

Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat, Indonesia
Email: muhhammad.asrori@fkip.untan.ac.id

Halida

Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat, Indonesia
Email: halida@fkip.untan.ac.id

**Corresponding Author*

Article History

Submitted : 2026-02-27

Revised : 2026-03-11

Accepted : 2026-03-12

Published : 2026-06-17

DOI: <https://doi.org/10.31571/jpkn.v10i1.10640>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kepala sekolah dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMP Negeri 2 Kota Pontianak. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah berperan strategis dalam empat dimensi utama, yaitu perencanaan program inklusif, pengorganisasian sumber daya secara kolaboratif, pelaksanaan supervisi pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan peserta didik, serta penguatan budaya sekolah yang menanamkan nilai empati dan penghargaan terhadap keberagaman. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif sangat ditentukan oleh kepemimpinan yang adaptif, partisipatif, dan kontekstual dalam mengintegrasikan kebijakan, praktik pembelajaran, dan budaya sekolah. Secara konseptual, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Pendidikan Kewarganegaraan dengan menegaskan bahwa implementasi pendidikan inklusif di sekolah merupakan bagian dari praktik pendidikan demokratis yang menumbuhkan nilai kesetaraan, penghargaan terhadap keberagaman, dan keadilan sosial dalam proses pembelajaran.

Kata Kunci: Peran Kepala Sekolah, Pendidikan Inklusif

Abstract

This study aims to analyze the role of the principal in improving the implementation of inclusive education at SMP Negeri 2 Pontianak City. The study employed a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis, and were analyzed thematically through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the principal plays a strategic role in four main dimensions: planning inclusive programs, organizing resources collaboratively, implementing learning supervision that is responsive to students' needs, and strengthening a school culture that promotes empathy and respect for diversity. These findings emphasize that the success of inclusive education is strongly influenced by adaptive, participatory, and contextual leadership in integrating policies, learning practices, and school culture. Conceptually, this study contributes to the development of Civic Education studies by highlighting that the implementation of inclusive education in schools represents a form of democratic educational practice that fosters the values of equality, respect for diversity, and social justice within the learning process.

Keyword: Principal's Role, Inclusive Education



PENDAHULUAN

Transformasi sistem pendidikan menuntut perubahan paradigma dari pendekatan homogen menuju sistem yang adaptif terhadap keberagaman peserta didik. Dalam konteks ini, pendidikan inklusif berkembang sebagai kerangka normatif yang menegaskan hak setiap anak untuk memperoleh layanan pendidikan yang setara tanpa diskriminasi berdasarkan kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, maupun latar belakang budaya. Perspektif ini sejalan dengan kerangka global yang dirumuskan oleh UNESCO yang menempatkan akses, partisipasi, dan keberhasilan belajar sebagai indikator utama sistem pendidikan inklusif (UNESCO, 2005). Di Indonesia, penguatan pendidikan inklusif juga didukung oleh kebijakan nasional, termasuk Surat Edaran Kemendiknas (2018) serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 yang menegaskan peran kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran yang bertanggung jawab dalam menciptakan budaya sekolah yang responsif terhadap keberagaman peserta didik.

Sejumlah penelitian telah mengkaji implementasi pendidikan inklusif dari perspektif manajemen dan mutu pendidikan. Rahmi (2018) serta Ridloah dkk. (2024) menyoroti pentingnya kepemimpinan kepala sekolah dalam pengambilan keputusan strategis. Studi lain menekankan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif memerlukan perencanaan program yang sistematis, pengorganisasian sumber daya yang efektif, serta supervisi pembelajaran yang berkelanjutan (Syarif Bahri, 2022; Titi Susilowati, 2022; Tsabita Khansa Kinanth, 2024). Selain itu, Nanda Rizki Wiliyanto (2022) menunjukkan pentingnya sinergi antara kebijakan sekolah dan praktik pembelajaran di kelas, sementara Umi Nadhiroh (2024) menekankan perlunya lingkungan belajar yang menjunjung kesetaraan dan sensitivitas terhadap kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.

Meskipun demikian, kajian terdahulu masih menyisakan beberapa kesenjangan penelitian. Pertama, sebagian besar penelitian lebih menekankan aspek manajemen pendidikan secara umum, sehingga dimensi kepemimpinan strategis kepala sekolah dalam membangun budaya sekolah inklusif belum banyak dikaji secara mendalam. Kedua, sebagian besar studi berfokus pada jenjang sekolah dasar, sedangkan kajian mengenai implementasi pendidikan inklusif pada tingkat sekolah menengah pertama masih relatif terbatas. Ketiga, penelitian yang mempertimbangkan konteks sosial-budaya lokal, khususnya pada wilayah yang memiliki karakter multikultural seperti Kota Pontianak, masih belum banyak dilakukan. Padahal, konteks sosial tersebut dapat memengaruhi strategi kepemimpinan sekolah dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan inklusif.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, studi ini bertujuan untuk menganalisis peran kepala sekolah dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMP Negeri

2 Kota Pontianak. Analisis difokuskan pada empat dimensi utama kepemimpinan sekolah, yaitu perencanaan program inklusif, pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan dan supervisi pembelajaran inklusif, serta evaluasi dan penguatan budaya sekolah yang mendukung nilai-nilai inklusivitas.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian kepemimpinan pendidikan dan manajemen pendidikan inklusif, khususnya dalam konteks sekolah menengah pertama. Secara praktis, temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penguatan praktik kepemimpinan sekolah dalam mengembangkan lingkungan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran kepala sekolah dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMP Negeri 2 Kota Pontianak. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada eksplorasi makna, proses, dan dinamika kepemimpinan dalam konteks alami sekolah, bukan pada pengujian hubungan antarvariabel secara statistik. Desain studi kasus memungkinkan peneliti mengkaji fenomena kepemimpinan secara komprehensif dan kontekstual dalam satu satuan pendidikan sebagai unit analisis. Pilihan metodologis ini sejalan dengan karakteristik penelitian kualitatif yang menekankan penggalian data secara mendalam dalam setting alamiah (Abdussamad, 2021; Fiantika dkk., 2022).

Subjek penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung informan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Informan utama adalah kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan dan pemimpin pembelajaran. Informan pendukung meliputi guru mata pelajaran, wakil kepala sekolah, tenaga kependidikan, serta pihak-pihak yang memiliki peran dalam pelaksanaan layanan inklusif di sekolah. Pemilihan informan dilakukan secara selektif berdasarkan relevansi peran dan kapasitasnya dalam memberikan informasi yang mendalam mengenai praktik kepemimpinan dan pengelolaan pendidikan inklusif. Strategi ini sesuai dengan prinsip penelitian kualitatif yang mengutamakan kedalaman data dibandingkan jumlah partisipan (Abdussamad, 2021). Secara rinci data informan dipaparkan berikut.

Tabel 1 Partisipan di SMP Negeri 2 Kota Pontianak

No	Partisipan	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Kepala Sekolah	Perempuan	1
2	Waka Kurikulum	Perempuan	1
3	Waka Kesiswaan	Perempuan	1

4	Guru Pendamping Khusus (GPK)	Laki-Laki	2
5	Guru Mapel dan wali kelas	Laki-laki	7
6	Peserta Didik	Laki-laki	5
Jumlah Partisipan			17

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali persepsi, strategi, serta pengalaman kepala sekolah dan guru dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif. Observasi dilakukan secara langsung terhadap praktik manajerial dan proses pembelajaran untuk melihat implementasi kebijakan inklusif dalam aktivitas sekolah sehari-hari. Studi dokumentasi mencakup analisis terhadap dokumen perencanaan sekolah, program kerja, struktur organisasi, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan layanan pendidikan inklusif. Penggunaan berbagai teknik ini memungkinkan peneliti melakukan triangulasi sumber dan triangulasi teknik guna meningkatkan kredibilitas temuan.

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung sejak proses pengumpulan data hingga tahap penarikan kesimpulan. Prosedur analisis mencakup reduksi data melalui proses seleksi dan pengkodean tematik, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis, serta penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan hubungan yang muncul dari data lapangan. Analisis dilakukan secara reflektif untuk menginterpretasikan bagaimana praktik kepemimpinan kepala sekolah berkontribusi terhadap penguatan budaya inklusif di sekolah. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member check kepada informan untuk memastikan kesesuaian interpretasi peneliti dengan realitas empiris. Dengan prosedur tersebut, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat kredibilitas dan ketepatan interpretatif yang memadai secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian ini disajikan berdasarkan fokus penelitian, yaitu peran kepala sekolah dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMP Negeri 2 Kota Pontianak berdasarkan empat dimensi sesuai dengan tujuan penelitian. Temuan diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik. Berdasarkan proses analisis, peran kepala sekolah dalam pendidikan inklusif teridentifikasi dalam empat dimensi utama, yaitu perencanaan program inklusif, pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan dan supervisi pembelajaran inklusif, serta evaluasi dan penguatan budaya sekolah inklusif. Implementasi kepemimpinan dalam keempat dimensi tersebut juga memberikan dampak terhadap peningkatan partisipasi belajar, kepercayaan diri,

serta keterlibatan siswa berkebutuhan khusus (PDBK) dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan sekolah yang adaptif dan kolaboratif tidak hanya memengaruhi tata kelola program inklusif, tetapi juga berkontribusi pada optimalisasi pengalaman belajar dan perkembangan akademik maupun sosial PDBK di lingkungan sekolah. Berikut dipaparkan hasil penelitiannya.

1. Perencanaan Program Pendidikan Inklusif

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kepala sekolah memiliki peran sentral dalam merumuskan arah kebijakan pendidikan inklusif. Kepala sekolah menyatakan bahwa perencanaan program dilakukan melalui rapat kerja tahunan dan diselaraskan dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Kepala sekolah menyampaikan:

“Kami tidak hanya menerima siswa berkebutuhan khusus secara administratif, tetapi memastikan sejak awal ada perencanaan program, termasuk penyesuaian kurikulum dan strategi pembelajaran yang lebih fleksibel.” (Hasil wawancara dengan kepala sekolah, pada 12 November 2025)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh guru mata pelajaran yang menyatakan:

“Setiap awal tahun ajaran kami diminta mengidentifikasi kebutuhan siswa dan menyusun rencana pembelajaran yang bisa mengakomodasi perbedaan kemampuan.” (Hasil wawancara dengan guru (G1) pada 2 Desember 2025)

Sepersepsi dengan pernyataan guru tersebut siswa juga menyatakan:

“Awal masuk guru katenya intruski kepala sekolah, kite dimintaknye mengidentifikasi kebutuhan kite ni ape dan langkah ini bagus bagi kami untuk mengakomodasi keperluan kite tu sesuai dengan perbedaan kemampuan kitelah.” (Hasil wawancara dengan siswa (S1) pada 5 Desember 2025)

Berdasarkan hasil wawancara, pernyataan kepala sekolah menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusif di sekolah tidak dipahami sebatas pemenuhan aspek administratif, melainkan sebagai proses yang dirancang secara sistematis sejak tahap perencanaan. Penegasan mengenai adanya penyesuaian kurikulum dan strategi pembelajaran yang fleksibel mengindikasikan bahwa kepala sekolah menjalankan fungsi kepemimpinan strategis dan instruksional secara simultan. Ia tidak hanya memastikan akses bagi siswa berkebutuhan khusus, tetapi juga mengintegrasikan prinsip inklusi ke dalam perencanaan program sekolah. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma pendidikan inklusif yang dikembangkan oleh UNESCO, yang menekankan bahwa inklusi mencakup akses, partisipasi, dan keberhasilan belajar seluruh peserta didik tanpa diskriminasi.

Pernyataan guru mata pelajaran memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa kebijakan kepala sekolah telah diterjemahkan ke dalam praktik konkret di tingkat kelas. Permintaan untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa pada awal tahun ajaran serta menyusun rencana pembelajaran yang mengakomodasi perbedaan kemampuan mencerminkan adanya

asesmen diagnostik dan perencanaan diferensiasi pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah berdampak langsung terhadap praktik pedagogis guru. Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa terdapat keselarasan antara kebijakan pada level manajerial dan implementasi pada level operasional, yang menjadi indikator kuat terbentuknya budaya sekolah inklusif yang terstruktur, responsif terhadap keberagaman, dan berorientasi pada kebutuhan individual peserta didik.

Hasil observasi menunjukkan adanya dokumen perencanaan berupa program kerja sekolah yang memuat agenda pelatihan guru terkait pendidikan inklusif. Studi dokumentasi terhadap Rencana Kerja Sekolah (RKS) juga memperlihatkan adanya alokasi kegiatan pengembangan kompetensi guru dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus.

Temuan ini menunjukkan bahwa fungsi perencanaan tidak bersifat simbolik, melainkan telah terintegrasi dalam dokumen formal sekolah.

2. Pengorganisasian dan Pengelolaan Sumber Daya

Dalam aspek pengorganisasian, kepala sekolah berperan dalam pembagian tugas dan koordinasi antar guru. Berdasarkan wawancara, kepala sekolah membentuk tim kecil yang bertugas memantau perkembangan siswa berkebutuhan khusus. Kepala sekolah menyatakan:

“Kami menunjuk guru yang memiliki kepedulian dan kesiapan untuk menjadi koordinator inklusi. Mereka berkoordinasi dengan wali kelas dan guru mata pelajaran.” (Hasil wawancara dengan kepala sekolah, pada 12 November 2025)

Guru yang ditunjuk sebagai koordinator inklusi menyampaikan:

“Walaupun belum ada guru pendamping khusus secara formal, kami mencoba berbagi peran agar siswa tetap mendapatkan perhatian.” (Hasil wawancara dengan guru (G2) pada 6 Desember 2025)

Dalam aspek pengorganisasian, temuan wawancara menunjukkan bahwa kepala sekolah menjalankan fungsi manajerial melalui pembagian tugas yang terstruktur dan koordinasi yang terarah dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pembentukan tim kecil untuk memantau perkembangan siswa berkebutuhan khusus mengindikasikan adanya desain organisasi yang responsif terhadap kebutuhan layanan khusus di sekolah. Penunjukan guru yang memiliki kepedulian dan kesiapan sebagai koordinator inklusi mencerminkan praktik *selective delegation*, yaitu pelimpahan tanggung jawab berdasarkan kompetensi dan komitmen personal. Strategi ini memperlihatkan bahwa kepala sekolah tidak hanya bertindak sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai penggerak kolaborasi profesional antarpendidik. Pola koordinasi antara koordinator inklusi, wali kelas, dan guru mata pelajaran menunjukkan adanya mekanisme komunikasi horizontal yang penting dalam membangun sistem dukungan internal bagi siswa berkebutuhan khusus.

Namun demikian, proses pengorganisasian tersebut juga menghadapi beberapa kendala struktural, terutama karena sekolah belum memiliki Guru Pendamping Khusus (GPK) secara formal. Ketiadaan GPK menyebabkan guru kelas dan guru mata pelajaran harus merangkap peran dalam memberikan dukungan pembelajaran kepada siswa berkebutuhan khusus, meskipun tidak semua guru memiliki latar belakang pendidikan khusus atau pelatihan yang memadai dalam penanganan kebutuhan belajar yang beragam. Kondisi ini berpotensi menimbulkan keterbatasan dalam diferensiasi pembelajaran, penyusunan program pembelajaran individual, serta pendampingan intensif bagi siswa yang memerlukan dukungan khusus. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, kepala sekolah mendorong penguatan kerja kolaboratif antar guru melalui koordinasi rutin, diskusi kasus siswa, serta pemanfaatan pengalaman dan kepedulian guru sebagai sumber dukungan internal bagi pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah.

Pernyataan guru koordinator inklusi semakin memperjelas dinamika tersebut. Meskipun sekolah belum memiliki guru pendamping khusus secara formal, inisiatif berbagi peran menunjukkan adanya adaptasi struktural untuk mengatasi keterbatasan sumber daya. Kondisi ini mencerminkan praktik kepemimpinan distributif, di mana tanggung jawab layanan inklusif tidak terpusat pada satu individu, melainkan dibagi secara kolektif. Dengan demikian, pengorganisasian yang dilakukan kepala sekolah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dan kolaboratif, karena mampu menciptakan sistem kerja tim yang memungkinkan layanan inklusif tetap berjalan meskipun terdapat keterbatasan tenaga khusus. Hal ini menjadi indikator bahwa kepemimpinan sekolah berkontribusi dalam membangun struktur pendukung yang fungsional bagi implementasi pendidikan inklusif secara berkelanjutan.

Hasil observasi menunjukkan adanya koordinasi rutin antar guru dalam rapat evaluasi bulanan. Dokumentasi notulen rapat memperlihatkan pembahasan khusus mengenai perkembangan siswa berkebutuhan khusus. Temuan ini menunjukkan bahwa pengorganisasian dilakukan secara adaptif meskipun terdapat keterbatasan sumber daya, khususnya belum tersedianya guru pendamping khusus secara permanen.

3. Pelaksanaan dan Supervisi Pembelajaran Inklusif

Pada tahap pelaksanaan, kepala sekolah tidak hanya berfungsi sebagai administrator, tetapi melakukan supervisi akademik untuk memastikan praktik pembelajaran berjalan sesuai prinsip inklusivitas. Guru menyampaikan bahwa kepala sekolah melakukan observasi kelas dan memberikan umpan balik. Salah satu guru menyatakan:

“Kepala sekolah sering masuk kelas, melihat bagaimana kami mengajar, terutama ketika ada siswa yang membutuhkan perhatian khusus. Setelah itu beliau memberikan masukan.” (Hasil wawancara dengan guru (G3) pada 6 Desember 2025)

Pada tahap pelaksanaan, data wawancara menunjukkan bahwa kepala sekolah tidak membatasi perannya pada fungsi administratif, melainkan menjalankan supervisi akademik secara aktif untuk menjamin implementasi prinsip inklusivitas di ruang kelas. Praktik observasi kelas yang dilakukan secara langsung, khususnya ketika terdapat siswa yang membutuhkan perhatian khusus, menunjukkan adanya kontrol mutu pembelajaran berbasis konteks. Hal ini mengindikasikan bahwa kepala sekolah berperan sebagai *instructional leader* yang terlibat dalam proses pedagogis, bukan sekadar pengelola kebijakan di tingkat dokumen.

Pernyataan guru yang menyebutkan bahwa kepala sekolah memberikan masukan setelah observasi memperlihatkan adanya mekanisme umpan balik konstruktif sebagai bagian dari siklus supervisi klinis. Dalam perspektif manajemen pendidikan, langkah tersebut mencerminkan fungsi pembinaan profesional (*professional coaching*) yang bertujuan meningkatkan kapasitas guru dalam menerapkan strategi pembelajaran diferensiatif. Fokus observasi pada siswa yang membutuhkan perhatian khusus juga menunjukkan bahwa supervisi dilakukan dengan sensitivitas terhadap keberagaman peserta didik, selaras dengan prinsip pendidikan inklusif yang menekankan partisipasi dan keterlibatan semua siswa sebagaimana ditegaskan oleh UNESCO.

Secara analitis, temuan ini mengindikasikan bahwa kepala sekolah menerapkan model kepemimpinan instruksional berbasis inklusi, di mana supervisi akademik menjadi instrumen untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan prinsip keadilan pendidikan. Dengan demikian, pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah tidak berjalan secara spontan, tetapi melalui proses pemantauan dan pembinaan yang sistematis untuk menjamin kualitas layanan bagi seluruh peserta didik.

Hasil observasi memperlihatkan adanya variasi metode pembelajaran, seperti penggunaan media visual dan pendekatan diferensiasi tugas bagi siswa dengan kebutuhan berbeda. Dokumentasi supervisi akademik menunjukkan adanya catatan evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut. Temuan ini menunjukkan bahwa fungsi supervisi dijalankan secara konstruktif dan berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran inklusif.

Selain itu, temuan lapangan juga menunjukkan adanya indikasi peningkatan partisipasi dan perkembangan belajar pada siswa berkebutuhan khusus setelah strategi supervisi dan pendampingan pembelajaran diterapkan. Guru menyampaikan bahwa beberapa siswa berkebutuhan khusus mulai menunjukkan keterlibatan yang lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas, seperti keberanian bertanya, menyelesaikan tugas yang disederhanakan, serta berpartisipasi dalam diskusi kelompok. Data dokumentasi sekolah juga menunjukkan bahwa sebagian siswa berkebutuhan khusus mampu menyelesaikan tugas pembelajaran sesuai dengan target yang disesuaikan dan menunjukkan perkembangan dalam aspek interaksi sosial

dengan teman sebaya. Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik kepemimpinan instruksional yang menekankan supervisi dan pembinaan guru turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengalaman belajar dan keberhasilan belajar siswa berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah inklusif.

4. Evaluasi dan Penguatan Budaya Sekolah Inklusif

Dimensi terakhir yang teridentifikasi adalah peran kepala sekolah dalam membangun budaya sekolah yang menerima keberagaman. Berdasarkan wawancara, kepala sekolah menekankan pentingnya nilai empati dan saling menghargai di antara warga sekolah. Kepala sekolah menyatakan:

“Kami terus menanamkan kepada siswa bahwa setiap anak punya kelebihan masing-masing. Tidak boleh ada diskriminasi.” (Hasil wawancara dengan kepala sekolah, pada 12 November 2025)

Guru juga menguatkan pernyataan tersebut:

“Lingkungan sekolah cukup mendukung. Anak-anak mulai terbiasa bekerja dalam kelompok yang heterogen.” (Hasil wawancara dengan guru (G5), pada 12 November 2025)

Observasi menunjukkan interaksi sosial yang relatif inklusif antar siswa, serta tidak ditemukannya segregasi fisik dalam penempatan tempat duduk. Dokumentasi tata tertib sekolah juga memuat aturan tentang larangan diskriminasi dan perundungan. Untuk memperjelas temuan, berikut ringkasan dimensi peran kepala sekolah:

Tabel 2. Dimensi Peran Kepala Sekolah dalam Pendidikan Inklusif

Dimensi Peran	Indikator Temuan	Sumber Data
Perencanaan	Integrasi program inklusi dalam RKS	Wawancara, Dokumentasi
Pengorganisasian	Pembentukan koordinator inklusi	Wawancara, Observasi
Supervisi	Observasi kelas dan umpan balik	Wawancara, Dokumentasi
Evaluasi Budaya	Penanaman nilai anti-diskriminasi	Observasi, Dokumentasi

Tabel 2 menunjukkan bahwa peran kepala sekolah tidak terbatas pada aspek administratif, tetapi mencakup dimensi strategis dan kultural dalam membangun sistem pendidikan inklusif di sekolah

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah di SMP Negeri 2 Kota Pontianak memainkan peran strategis dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan inklusif melalui empat dimensi utama: perencanaan program inklusif, pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan supervisi pembelajaran, dan pembentukan budaya sekolah yang inklusif. Temuan ini selaras dengan teori kepemimpinan pendidikan yang dikemukakan oleh Rahmi (2018) dan Ridloah dkk. (2024) bahwa kepala sekolah tidak hanya berfungsi sebagai administrator, tetapi juga sebagai pemimpin pedagogis yang merancang, mengarahkan, serta mengevaluasi

dinamika pembelajaran dan organisasi sekolah. Dalam perspektif manajemen mutu, Sutikno (2021) menekankan bahwa efektifitas kepemimpinan berperan signifikan dalam pembentukan komitmen guru dan budaya organisasi, yang implikasinya juga terlihat dalam hasil penelitian ini di mana kepala sekolah terlibat langsung dalam supervisi pembelajaran dan pengelolaan sumber daya manusia.

Temuan ini menguatkan kajian dalam *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* yang menggarisbawahi peran kepemimpinan dalam membangun budaya organisasi sekolah yang positif. Misalnya, penelitian literatur oleh Rusi, Wicaksono, dan Waruru menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang transformasional dan partisipatif mampu menciptakan iklim sekolah yang mendukung kolaborasi, motivasi, dan keterlibatan semua pihak dalam kegiatan sekolah, termasuk dalam konteks inklusi (Rusmini Rusi dkk., 2025). Temuan ini konsisten dengan peran kepala sekolah di SMP Negeri 2 yang aktif memfasilitasi koordinasi antar guru dan mengembangkan praktik pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.

Hubungan antara praktik kepemimpinan inklusif dengan nilai-nilai kewarganegaraan juga didukung oleh penelitian lain dalam jurnal yang sama. Misalnya, Ali (2020) menunjukkan bahwa penguatan pengetahuan kewarganegaraan melalui pendekatan pembelajaran yang partisipatif dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam komunitas sekolah (Ali, 2020). Temuan serupa muncul dalam kajian Sastra Atmaja (2024) yang menunjukkan integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam pembelajaran kewarganegaraan berkontribusi pada pembentukan karakter siswa yang menghargai keberagaman, suatu aspek penting dalam pendidikan inklusif (Sastra Atmaja, 2024). Kedua studi ini menunjukkan bahwa praktik pendidikan yang menginternalisasi nilai inklusivitas dan penghormatan terhadap perbedaan dapat menjadi basis teoritis bagi transformasi pendidikan inklusif di sekolah.

Di sisi lain, penelitian Fadhilah dan Dewi (2021) mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam pembentukan nasionalisme mengindikasikan bahwa proses pembelajaran yang kontekstual dan relevan budaya mampu memupuk kesadaran sosial siswa terhadap nilai-nilai kebangsaan (Fadhilah & Dewi, 2021). Temuan ini sejalan dengan observasi di SMP Negeri 2 bahwa kepala sekolah menanamkan nilai empati dan penghargaan terhadap perbedaan sebagai bagian dari budaya sekolah inklusif. Sementara itu, Nanggala dan Komalasari (2023) menekankan pentingnya orientasi pendidikan kewarganegaraan global yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan untuk membangun toleransi dan kedamaian, yang secara konseptual mendukung fakta bahwa pendidikan inklusif bukan hanya kebijakan struktural, tetapi juga sebuah wacana nilai yang harus diinternalisasi dalam praktik pembelajaran (Nanggala & Komalasari, 2023).

Penggabungan temuan empiris dengan kajian teoritis ini menunjukkan bahwa kepala sekolah bukan hanya berperan sebagai agen administrasi, tetapi juga sebagai aktor kultural dan pedagogis yang menghidupkan nilai-nilai inklusivitas dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Dari perspektif teori kepemimpinan, hal ini memperluas model kepemimpinan transformasional dan partisipatif dengan menambahkan dimensi kepekaan kontekstual terhadap karakter sosial-budaya lokal, suatu kontribusi teoritis yang memodifikasi teori kepemimpinan pendidikan tradisional. Modifikasi ini relevan karena konteks Kota Pontianak yang plural dan multikultural menuntut kepemimpinan yang responsif terhadap nilai-nilai lokal sekaligus universal.

Penelitian ini juga memperkaya diskursus tentang pendidikan inklusif dengan menyajikan bukti bahwa keberhasilan inklusi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan formal, tetapi juga oleh praktik kepemimpinan yang mengenal dan menghargai konteks lokal, sehingga memunculkan model kepemimpinan inklusif kontekstual .



Gambar 1. Model Kepemimpinan Sekolah Inklusif Berbasis Empat Pilar

Model ini menekankan empat pilar: (1) perencanaan inklusif berdasarkan kebutuhan peserta didik, (2) pengorganisasian kolaboratif antar pendidik, (3) supervisi berorientasi pembelajaran, dan (4) penanaman nilai-nilai inklusivitas sebagai bagian dari budaya sekolah. Pendekatan ini tidak hanya menjawab tantangan administratif, tetapi juga menjawab kebutuhan nilai dan budaya dalam proses pendidikan. Dengan demikian, temuan penelitian ini tidak hanya menguatkan teori-teori sebelumnya, tetapi juga memodifikasi dan memperluasnya dengan memasukkan dimensi nilai-nilai kewarganegaraan dan konteks sosial lokal sebagai komponen integral dalam kepemimpinan pendidikan inklusif.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepala sekolah dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMP Negeri 2 Kota Pontianak. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah menjalankan peran strategis yang tidak terbatas pada fungsi administratif, melainkan mencakup kepemimpinan pedagogis dan kultural dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif. Peran tersebut terwujud dalam empat dimensi utama, yaitu perencanaan program inklusif yang terintegrasi dalam dokumen sekolah, pengorganisasian sumber daya secara kolaboratif, pelaksanaan supervisi pembelajaran yang berorientasi pada diferensiasi kebutuhan peserta didik, serta penguatan budaya sekolah yang menanamkan nilai empati dan penghargaan terhadap keberagaman.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pendidikan inklusif sangat ditentukan oleh kapasitas kepala sekolah dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik operasional yang kontekstual. Dalam konteks SMP Negeri 2 Kota Pontianak yang berada pada lingkungan sosial multikultural, kepala sekolah tidak hanya bertindak sebagai pengelola program, tetapi juga sebagai agen perubahan budaya sekolah. Kepemimpinan yang adaptif dan partisipatif memungkinkan terbangunnya kolaborasi antar guru serta terciptanya iklim sekolah yang mendukung keberagaman peserta didik.

Secara teoretis, penelitian ini mengembangkan gagasan tentang kepemimpinan inklusif kontekstual, yaitu model kepemimpinan yang mengintegrasikan fungsi manajerial, pedagogis, dan kultural dalam satu kerangka yang responsif terhadap karakter sosial-budaya lokal. Model ini menegaskan bahwa pendidikan inklusif bukan sekadar implementasi kebijakan, tetapi proses transformasi nilai yang dipimpin secara strategis oleh kepala sekolah. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada penguatan perspektif bahwa keberhasilan pendidikan inklusif bergantung pada kepemimpinan yang mampu menghubungkan regulasi, praktik pembelajaran, dan budaya sekolah secara terpadu.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah bahwa kepala sekolah dapat menggunakan empat pilar kepemimpinan perencanaan, pengorganisasian, supervisi, dan budaya sekolah sebagai panduan untuk mengoptimalkan implementasi pendidikan inklusif. Sekolah diharapkan membangun mekanisme kolaboratif antar guru, memperkuat supervisi diferensiatif, dan menanamkan nilai inklusivitas dalam seluruh kegiatan pembelajaran serta interaksi sosial siswa.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.

- Ali, M. (2020). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Partisipasi Warga Negara Muda. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(2), 115–126.
- Fadhilah, N., & Dewi, D. A. (2021). Peran pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Karakter Nasionalisme Peserta Didik. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1), 45–56.
- Fiantika, F. R., dkk. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Kemendiknas. (2010). *Surat edaran tentang penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan inklusif*. Kementerian Pendidikan Nasional.
- Nanda Rizki Wiliyanto. (2022). Manajemen Pendidikan Inklusi di SMAN 1 Padang. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(1), 1–12. Doi: <https://doi.org/10.55352/mudir.v4i1.130>
- Nanggala, A., & Komalasari, K. (2023). Pendidikan Kewarganegaraan Global Dalam Membangun Toleransi Generasi Muda. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(2), 89–101.
- Rahmi, S. (2018). *Kepala sekolah dan guru profesional*. Percetakan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Ridloah, S., dkk. (2024). *Pengantar Manajemen Pendidikan*. Seval Literindo Kreasi.
- Rusmini, R., Wicaksono, A., & Waruru, D. (2025). Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah Dalam Membangun Budaya Organisasi Sekolah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(1), 15–27.
- Sastra Atmaja, R. (2024). Integrasi Nilai Kearifan Lokal Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(2), 132–144.
- Sutikno, Y. (2021). *Manajemen Mutu Pendidikan Di Lembaga Pendidikan*. STAB Maitreyawira.
- Syaiful Bahri. (2022). Manajemen Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 94–100. Doi: <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.1754>
- Titi Susilowati. (2022). Manajemen Pendidikan Inklusi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(3), 920–928. Doi: <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i3.513>
- Tsabita Khansa Kinanth. (2024). Meningkatkan Efektivitas Manajemen Sekolah Dalam Penerapan Pendidikan Inklusif Di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(3), 1–9. Doi: <https://doi.org/10.47134/pgsd.v1i3.532>
- Umi Nadhiroh. (2024). Pendidikan Inklusif: Membangun Lingkungan Pembelajaran Yang Mendukung Kesetaraan dan Kearifan Budaya. *Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya*, 8(1), 11–22. Doi: <http://dx.doi.org/10.30872/jbssb.v8i1.14072>
- UNESCO. (2005). *Guidelines for inclusion: Ensuring access to education for all*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.